

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya, setiap negara pasti mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan perekonomian negaranya sehingga taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut maka perlu adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta meratanya pendapatan antar daerah. Secara teoritis, peningkatan ekonomi yang cepat akan mengakibatkan disparitas distribusi pendapatan di seluruh negara. Dalam hal distribusi pendapatan yang diberikan oleh masing-masing masyarakat dalam satu daerah atau negara. Ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan pemerataan, apabila ketimpangan pendapatan meningkat, distribusi pendapatan masyarakat suatu daerah akan mengalami timpang atau ketidakmerataan. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan (*gap*) dikarenakan hanya beberapa daerah saja yang pendapatannya relatif lebih besar (Amri, 2017).

Konsep ketimpangan pendapatan mengacu pada perbedaan dalam kemakmuran, standar hidup, dan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat, yang menyebabkan distribusi yang tidak merata di antara wilayah karena perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Tidak hanya aspek yang berasal dari sumber daya manusia saja, namun juga dari aspek sumber daya alam seperti perbedaan karakteristik geografis dan potensi alam. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di antara daerah di

Indonesia menyebabkan ketimpangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain (Angelia, 2010).

Di beberapa negara berkembang tak terkecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja. Melainkan dengan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. (Prasetyo, 2008)

Galor dan Zeira (1993) membuktikan secara empirik bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketidakmerataan pendapatan bagi tingkat pendapatan rendah akan tetapi memberikan pengaruh negatif bagi tingkat pendapatan lain. Pemerataan ekonomi melalui pemerataan pendapatan menjadi capaian ekonomi yang mendesak untuk dicapai, baik negara maju maupun negara berkembang. Model praktis pemerataan ekonomi yang dapat diimplementasikan menjadi jawaban akan permasalahan kontemporer ekonomi pembangunan ini.

Ketimpangan yang besar dan dalam dialami masyarakat dunia adalah ironi dari sebuah sistem ekonomi yang menjanjikan pertumbuhan harta kekayaan dan keberlimpahan. Penelitian oleh duo Meadows, Randers dan Behrens III menggambarkan dengan ekstrapolasi data bahwa bumi tidak memiliki daya dukung untuk terus tumbuh dan berkembang kecuali pasti menimbulkan masalah serius dalam bidang ekonomi dan sosial. Meski kurang didukung oleh data yang memadai, kemunculan buku tersebut yang berbasis peringatan dari ilmuwan abad sembilan belas seperti David Ricardo dan Malthus, direspons banyak pihak dan terbukti saat

ini menimbulkan dampak ekonomi berupa ketimpangan pendapatan yang lebar dan dalam. *“They demonstrate that the process of economic growth, as it is occurring today, is inexorably widening the absolute gap between the rich and the poor nations of the world”* "Mereka menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi saat ini, tidak dapat dilepaskan lagi kesenjangan absolut antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia"

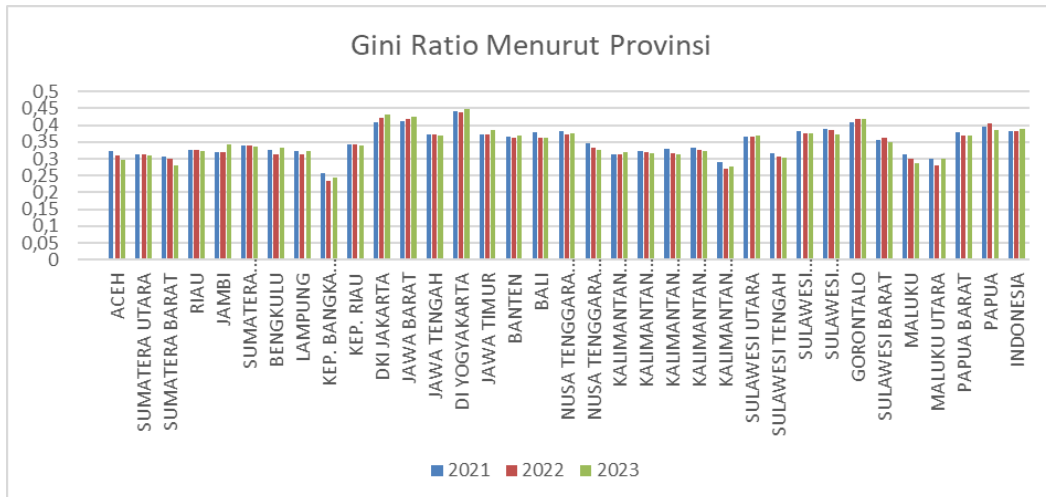
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan adalah ketika tingkat pendapatan tidak merata di antara orang-orang. Salah satu cara untuk menunjukkan tingkat ketimpangan di Indonesia adalah dengan menggunakan gini rasio. Koefisien ini dihitung berdasarkan jumlah barang, jasa, dan non-jasa yang dikonsumsi keluarga.

Ketimpangan ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, ketimpangan juga berkaitan dengan kediktatoran dan pemerintah yang gagal menghargai *property rights* (Glaeser, 2006). Berdasarkan teori kutub pertumbuhan menurut Tarigan (dalam Sianturi, 2011) dijelaskan bahwa kutub pertumbuhan dalam suatu daerah yang semakin banyak akan mampu meratakan distribusi pendapatan daerah tersebut dan menurunkan angka ketimpangannya, meskipun daerah-daerah kumuh (*slum*) akan tetap muncul. Namun seiring berjalannya waktu, daerah *slum* tersebut akan semakin berkurang pada saat kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru terus bertambah. Hasil penelitian Abdillah dan Mursinto (2014) menyatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi tantangan serupa dengan adanya ketimpangan ekonomi di tiap daerahnya. Tidak ada daerah maju atau sedang berkembang yang tidak mengalami

ketimpangan pendapatan. Data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari tahun ke tahun akan tetapi, di beberapa provinsi yang lain laju pertumbuhan ekonominya masih relatif rendah. Angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Papua yaitu sebesar 14,84%. Sedangkan pertumbuhan paling rendah diperoleh Kalimantan Timur yaitu sebesar 4,09%. Pada tahun sama, DIY menempati nomor dua terbawah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% (BPS: 2013)

Ketimpangan pendapatan dapat terjadi di seluruh negara dan regional (Khoirudin & Musta'in, 2020). Tidak hanya negara miskin dan berkembang yang memiliki masalah dengan ketimpangan ekonomi, bahkan negara maju dengan GNP tinggi dan pendapatan per kapita di atas 30.000 dolar AS juga mengalami ketimpangan sosial yang dalam. Salah satu Provinsi di Indonesia yakni di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang hanya memiliki 5 daerah, yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Provinsi DIY adalah salah satu daerah dengan tingkat disparitas tertinggi di Indonesia. Di tahun 2013, Provinsi DIY menduduki peringkat kedua di Indonesia ketika melihat kembali satu dekade terakhir dibandingkan dengan Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta. Provinsi DIY masih menduduki peringkat tertinggi pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, rasio gini Provinsi DIY di tahun 2020 adalah 0,434 sampai dengan tahun 2023 mencapai angka 0,449 angka ini menjadikan kota pelajar sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia.

Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 1.1

Gini Ratio Menurut Provinsi Indonesia Semester 1 (Maret) 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dari gambar 1.1 tingkat ketimpangan Provinsi DIY tercatat dalam beberapa tahun terakhir sebagai provinsi yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,441 (2021), sebesar 0,439 (2022), dan sebesar 0,449 (2023) ini adalah tingkat ketimpangan terbesar di Indonesia dan mengalahkan angka ketimpangan nasional. Dan angka terendah ketimpangan berada pada Provinsi Kep. Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu di nikmati oleh sebagian besar penduduk di Indonesia.

Dalam teori ekonomi makro, pembangunan manusia (IPM) tergantung pada dua aspek utama yakni, pertumbuhan ekonomi dan menurunnya ketimpangan antar penduduk (Sargent, 2009; Davidson, 2011). hasil penelitian dari Lavrinovicha et al (2016) ; Kim dan Shao et al (2016); Kudasheva, Kunitsa, dan Mukhamediyev

(2015) menyatakan bahwa ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan dan tidak meratanya akses pendidikan.

Tabel 1.1
Gini Ratio Kab/kota Provinsi Yogyakarta 2020-2023

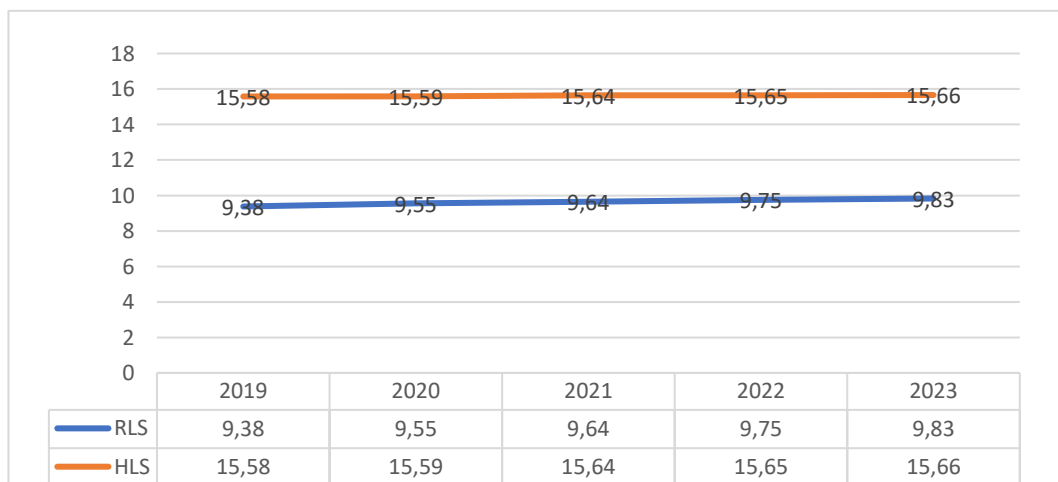
No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Bantul	0,418	0,441	0,410	0,454
2.	Kab. Gunung kidul	0,352	0,323	0,316	0,343
3.	Kab. kulon Progo	0,379	0,367	0,380	0,402
4.	Kab. Sleman	0,420	0,425	0,418	0,433
5.	Kota. Yogyakarta	0,421	0,464	0,519	0,454

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa gini ratio bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Dapat dilihat terdapat wilayah yang memiliki angka gini rasio paling tinggi yaitu kota Yogyakarta dengan wilayah ketimpangan yang paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 0,519. Sedangkan wilayah dengan ketimpangan terendah yaitu Kabupaten Gunung Kidul.

Kondisi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang akan diterima. Kondisi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan, produktivitas, kualitas, kesempatan kerja dan upah minimum yang berlaku di daerah tempat tenaga kerja menetap. Tidak semua tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang sama memiliki kesempatan yang sama pula untuk mendapatkan standar pendapatan tertentu. Bahkan beberapa tenaga kerja yang

memiliki pendidikan lebih rendah justru memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun jumlah tenaga kerja yang terserap biasanya menentukan kondisi pemerataan pendapatan, karena saat ada tenaga kerja yang tidak terserap atau menganggur maka tidak akan berkontribusi terhadap pendapatan. Sullivan dan Smeeding (1997) juga menyatakan bahwa perbedaan ketimpangan pendapatan di negara-negara maju yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan.



Gambar 1.2
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Provinsi
Yogyakarta 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik 1. memperlihatkan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang dapat merefleksikan tingkat pendidikan di Provinsi Yogyakarta tahun 2019-2023. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Yogyakarta menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya meskipun peningkatannya tidak terlalu tinggi. Namun hal yang menjadi perhatian adalah rata-rata lama sekolah di DIY tahun 2023 hanya 9,83 tahun. Jika menurut jenjang waktu

sekolah yang normal, 12 tahun lama sekolah setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk memperkuat alasan mengapa pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, disertakan juga tabel rata-rata pendapatan pekerja per-bulan menurut pendidikan menurut data BPS. Pada tabel 1.di bawah, dijelaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seorang tenaga kerja maka rata-rata pendapatan yang diterima juga semakin tinggi. Ketika rata-rata tingkat pendidikan antar tenaga kerja tidak berbeda jauh, maka rata-rata pendapatan yang diterima juga tidak akan berbeda jauh. Sangat penting bagi generasi selanjutnya untuk memiliki pendidikan minimal sampai ke bangku perkuliahan untuk mendapatkan pendapatan yang tidak terlalu rendah.

Tabel 1.2
Rata-rata Pendapatan Pekerja Menurut Pendidikan Provinsi DIY data semester tahun 2021-2022

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Februari 2021	Agustus 2021	Februari 2022	Agustus 2022
Tidak pernah sekolah / Belum tamat SD	942,8	1216,86	803,8	748,3
SD	1153	1338,92	819,0	905,8
SMP	1345,3	1476,3	1404,6	1400,3
SMA ke Atas	1052,5	1396,11	1699,5	1897,7

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

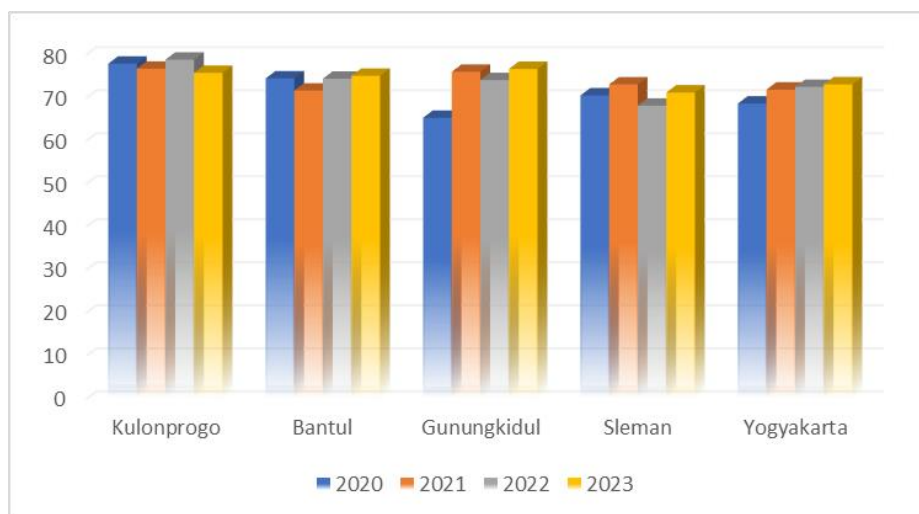
Tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah akan mendapatkan gaji yang rendah pula. Penelitian ILO (2013) juga mendukung hal tersebut bahwa selain rata-

rata pendapatan yang rendah, situasi yang lebih sulit biasanya akan dihadapi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah karena pertumbuhan pendapatannya relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

Ungkapan di atas juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Martins dan Pereira, 2004) yang menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Sullivan dan Smeeding (1997) juga menyatakan bahwa perbedaan ketimpangan pendapatan di negara-negara maju yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari modal sumber daya manusia yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2006), pendidikan menjadi hal pokok yang diperlukan setiap individu untuk mendapat masa depan yang lebih baik.

Salah satu negara berkembang dengan populasi paling padat di dunia adalah Indonesia, dengan urutan nomor 4 setelah Amerika Serikat, India, dan China. Perekonomian setiap negara dapat dipengaruhi secara positif maupun negatif oleh kenaikan jumlah penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja dan kapasitas produksi. Kondisi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya peningkatan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja akan merugikan negara karena ada kemungkinan peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga berakibat pada ketimpangan pendapatan. Secara umum, ketidakseimbangan distribusi pendapatan disebabkan adanya kondisi geografis,

kenaikan dan penurunan dalam sektor industri sumber manusia dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, para pemikir ekonomi seperti Callan, et. al (1998) melakukan penelitian untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dengan menggunakan variabel tingkat partisipasi Angkatan kerja Wanita (TPAK) dan menemukan hasil bahwa dengan meningkatkan TPAK Wanita nilai ketimpangan pendapatan di negara Irlandia menurun pada periode penelitian 1987-1994., et. al (2017) dalam penelitian lain juga menemukan bahwa dengan meningkatkan TPAK Wanita dapat membantu mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Negara Swiss tahun 2000-2014. Tingkat Partisipasi Kerja di Provinsi Yogyakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3

**Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Yogyakarta
Menurut Kab/Kota 2020-2023**

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan gambar 1.2 setiap wilayah di Provinsi Yogyakarta memiliki peningkatan yang bersifat fluktuatif dengan data terakhir yang memiliki

peningkatan yang signifikan adalah kab. Gunung Kidul dengan mencapai angka sebesar 76,66.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor khususnya faktor sumber daya manusia dan tenaga kerja. Selain dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yang mempengaruhi ketimpangan yaitu tidak meratanya pendapatan daerah, itu juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, apabila pendapatan asli daerah meningkat maka ketimpangan menurun begitu juga sebaliknya apabila pendapatan asli daerah menurun maka ketimpangan meningkat.

Ketimpangan antar wilayah yang terjadi sebelum adanya otonomi daerah disebabkan karena sentralisasi pembangunan yang membuat proses pembangunan menjadi kurang efisien. Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Otonomi daerah didukung dengan adanya desentralisasi yang salah satunya mengatur sumber pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Darise, 2009). Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain yang PAD yang Sah. Semakin banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia

yang dapat dimanfaatkan oleh daerah, maka semakin besar jumlah PAD yang akan diperoleh daerah tersebut.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kab/kota di Provinsi Yogyakarta
tahun 2020-2023 (Miliar Rupiah)

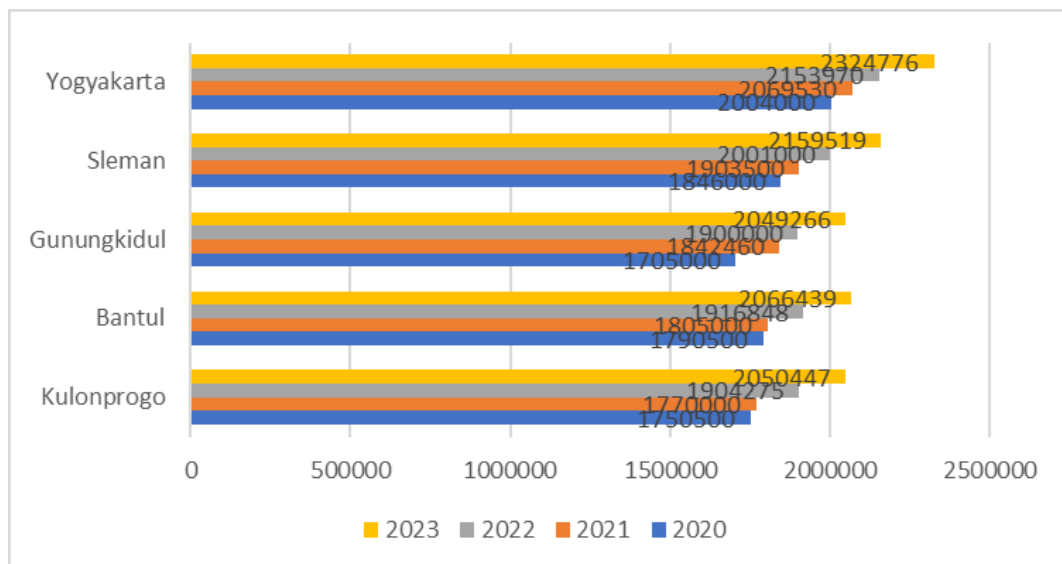
No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1.	Kab. Kulon Progo	254,42	307,15	308,16	258,06
2.	Kab. Bantul	479,61	491,67	540,57	587,37
3.	Kab. Gunung Kidul	228,21	256,37	313,52	276,12
4.	Kab. Sleman	788,25	803,68	1061,06	851,93
5.	Kota Yogyakarta	563,17	598,12	725,58	803,67

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah PAD yang terealisasi di daerah Provinsi Yogyakarta pada tahun 2020-2023 memiliki kecenderungan meningkat. Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yaitu sebesar 851,93 miliar dan 803,67 miliar pada tahun 2023. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo memiliki nilai terendah yaitu 258,06 miliar pada tahun 2023.

Faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat upah. Penduduk yang sudah memasuki angkatan kerja akan membutuhkan upah layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi karena kesempatan kerja atau peluang kerja sangat kompetitif maka akan berimbas terhadap tingkat pengangguran. Regulasi mengenai pengupahan diatur oleh pemerintah melalui

peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tentang Upah Minimum, yang saat ini dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk Provinsi sedangkan untuk kab/kota dikenal dengan istilah (UMK).



Gambar 1.4

Upah Minimum Kab/Kota Yogyakarta tahun 2020-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Grafik di atas menggambarkan terjadinya kenaikan upah minimum di daerah Provinsi Yogyakarta selama 4 tahun terakhir dapat dilihat nilai tertinggi Upah Minimum Provinsi berada di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 2324776. Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong adanya pemerataan pendapatan terhadap masyarakat, namun kenaikan upah di setiap tahunnya juga dibarengi dengan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif.

Berdasarkan fenomena uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan

pendapatan antar wilayah di Provinsi Yogyakarta sehingga diharapkan bisa digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Yogyakarta. Peneliti mengambil judul penelitian **”Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) terhadap Ketimpangan Pendapatan Di kab/kota Provinsi D.I.Y Tahun 2011-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Secara Parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2011-2023
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2011-2023

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) secara parsial terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2011-2023.
2. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) secara bersama-sama terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2011-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian "Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, TPAK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) di Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta 2011-2023" adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai Tingkat Pendidikan, TPAK, PAD, dan UMK terhadap ketimpangan pendapatan Kab/Kota di Provinsi D.I.Y

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan mengatur strategi pemerataan pendapatan di Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait ketimpangan pendapatan.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Yogyakarta.

1.5 Lokasi dan Tempat Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kab/kota Provinsi Yogyakarta dengan pengambilan data menggunakan *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). *Website* tersebut menyajikan data-data yang valid mengenai ketimpangan pendapatan di Provinsi Yogyakarta.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak diterbitkannya surat keputusan tentang pembimbing skripsi/tugas akhir pada tanggal 13 September 2023. Adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 1.2

